



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 perlu pengaturan pengajuan permintaan Uang Persediaan SKPD;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 123 tahun 2021);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU) SKPD atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : 1. Penetapan batas jumlah Uang Persediaan disesuaikan dengan pagu anggaran masing-masing SKPD dengan memperhatikan kewajaran Nilai Uang Persediaan.
2. Besarnya jumlah Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari Pagu DPA sesuai klasifikasi belanja yang diizinkan untuk pemberian Uang Persediaan.
- KETIGA : Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
- KEEMPAT : Ketentuan pengajuan Tambahan Uang (TU) Persediaan adalah:
1. Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
2. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan oleh PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
3. Besarnya pengajuan Tambahan Uang Persediaan dapat diberikan:
(a) Maksimal untuk mendanai 3 (tiga) kegiatan dalam waktu yang bersamaan; atau
(b) Jumlah tambah Uang Persediaan untuk 1 (satu) sub kegiatan setinggi-tingginya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. Besarnya pengajuan Tambahan Uang Persediaan untuk program, kegiatan, sub kegiatan yang bersifat khusus untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda, SKPD dapat mengajukan melebihi batas besarnya Tambahan Uang Persediaan sebagaimana ketentuan pada Point 3 huruf b dan mendapat persetujuan dari PPKD.
5. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan berikutnya dapat diberikan jika Tambahan Uang Persediaan yang lalu telah dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SPP/SPM/SP2D-TU Nihil beserta bukti belanja.
- KELIMA : Ketentuan pertanggungjawaban atas penggunaan dana UP/GU/TU diatur sebagai berikut:
1. Pengajuan Uang Persediaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas penggunaan dana UP/GU/TU.
2. Penyampaian pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

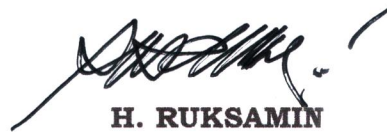
3. Sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
4. Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEENAM Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan Uang Persediaan yang dokumennya sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dalam DPA yang berdasarkan pada prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Wanggudu
Pada tanggal : 2 Januari 2023

 BUPATI KONAWE UTARA, b


H. RUKSAMIN

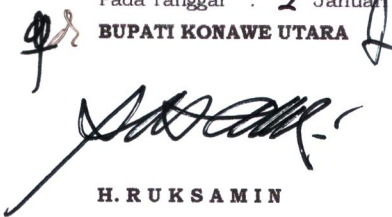
PENETAPAN BESAR UANG PERSEDIAAN (UP) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pagu Definitif	Belanja Mekanisme Langsung (LS)	Taksiran Belanja Menurut Klasifikasi UP	Pagu UP Definitif
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	142,984,221,785	122,901,552,306	20,082,669,479	1,600,000,000
2	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	270,262,000	52,258,000	218,004,000	18,000,000
3	DINAS KESEHATAN	97,856,954,355	67,327,944,424	30,529,009,931	1,200,000,000
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	22,497,465,299	4,534,803,146	9,962,662,153	500,000,000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	301,730,850,868	294,957,063,534	6,773,787,334	500,000,000
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7,196,782,141	5,170,886,081	2,025,896,060	160,000,000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6,656,317,599	1,841,881,699	4,814,435,900	300,000,000
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	7,233,521,595	4,603,816,835	2,629,704,760	160,000,000
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	109,881,173,166	107,132,820,876	2,748,352,290	180,000,000
10	DINAS SOSIAL	13,358,591,407	9,926,747,547	3,431,843,860	250,000,000
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,866,415,919	2,277,471,159	3,588,944,760	250,000,000
12	UPTD PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	837,337,374	-	837,337,374	69,700,000
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	6,054,931,037	3,618,069,678	2,436,861,359	200,000,000
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26,819,956,295	23,638,592,834	3,181,363,461	260,000,000
15	DINAS KEPENDUDUKAN PENDATANGAN SIPIL	4,359,141,281	1,790,158,264	2,568,983,017	200,000,000
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8,171,412,796	4,060,855,369	4,110,557,427	250,000,000
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18,507,587,892	5,732,569,741	12,775,018,151	750,000,000
18	DINAS PERHUBUNGAN	9,013,450,213	4,842,701,830	4,170,748,383	225,000,000
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,774,701,362	4,620,692,019	3,154,009,343	260,000,000
20	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	8,361,497,000	3,162,432,951	5,199,064,049	250,000,000
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	8,213,803,512	4,478,186,155	3,735,617,357	150,000,000
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	26,698,571,099	23,936,250,199	2,791,120,900	232,000,000
23	DINAS PERPUSTAKAAN	6,526,702,945	3,883,403,579	2,643,299,366	150,000,000
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	16,360,748,956	13,875,297,996	2,485,450,960	200,000,000
25	DINAS PARIWISATA	7,927,067,940	4,082,397,990	3,844,669,950	150,000,000
26	DINAS PERKEBUNAN	22,298,236,205	18,908,553,905	3,389,682,300	200,000,000
27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	33,057,363,524	21,311,028,503	11,746,335,021	450,000,000
28	UPTD BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	93,670,360	32,781,000	60,889,360	5,000,000
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6,431,857,129	3,318,684,993	3,113,172,136	200,000,000
30	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	16,391,427,129	13,093,482,075	3,297,945,054	200,000,000
31	UPT BALAI LATIHAN KERJA	249,837,550	20,000,000	229,837,550	19,000,000
32	BAGIAN UMUM	21,545,595,455	6,418,608,150	15,126,987,305	1,200,000,000
33	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2,307,453,108	477,407,000	1,830,046,108	150,000,000
34	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1,508,429,912	240,821,817	1,267,608,095	105,000,000
35	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1,307,725,854	149,369,000	1,158,356,854	95,000,000
36	BAGIAN HUKUM	1,308,573,000	262,018,000	1,046,555,000	103,000,000
37	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9,349,579,000	7,407,433,000	1,942,146,000	170,000,000
38	BAGIAN ORGANISASI	1,507,160,221	195,358,000	1,311,802,221	100,000,000
39	BAGIAN PEREKONOMIAN	1,306,747,833	171,452,000	1,135,295,833	90,000,000
40	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	70,624,157,597	66,756,613,143	3,867,544,454	350,000,000
41	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	1,308,588,000	345,477,000	963,111,000	90,000,000
42	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1,538,499,500	346,001,000	1,192,498,500	100,000,000
43	BAGIAN KERJASAMA	1,508,500,000	217,843,000	1,290,657,000	90,000,000
44	SEKRETARIAT DPRD	32,830,892,380	19,662,091,380	19,662,091,380	1,200,000,000
45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16,370,733,996	7,126,998,191	9,243,735,805	450,000,000
46	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	381,177,585,333	334,692,695,845	46,484,889,488	950,000,000
47	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8,479,931,628	3,140,431,328	5,339,500,300	350,000,000
48	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7,521,929,175	2,407,746,807	5,114,182,368	300,000,000
49	INSPEKTORAT	9,826,751,112	2,334,365,726	7,492,385,386	500,000,000
50	KECAMATAN SAWA	1,923,810,934	1,348,760,434	575,050,500	47,000,000
51	KELURAHAN SAWA	723,894,120	329,541,200	394,352,920	32,000,000
52	KECAMATAN LASOLO	3,441,741,708	2,949,414,708	492,327,000	41,000,000

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pagu Definitif	Belanja Mekanisme Langsung (LS)	Taksiran Belanja Menurut Klasifikasi UP	Pagu UP Definitif
1	2	3	4	5	6
53	KELURAHAN TINOBU	700,000,000	262,027,500	437,972,500	35,000,000
54	KECAMATAN ASERA	2,483,715,265	2,029,415,515	454,299,750	37,000,000
55	KELURAHAN WANGGUDU	699,660,409	315,401,319	384,259,090	32,000,000
56	KELURAHAN ASERA	699,177,454	301,164,500	398,012,954	33,000,000
57	KECAMATAN WIWIRANO	2,420,435,493	2,164,161,573	256,273,920	21,300,000
58	KELURAHAN LAMONAE	724,243,956	333,651,200	390,592,756	32,000,000
59	KECAMATAN MOLAWÉ	2,215,729,318	1,640,729,318	575,000,000	47,000,000
60	KELURAHAN MOLAWÉ	700,000,000	121,601,000	578,399,000	48,000,000
61	KECAMATAN LEMBO	1,888,600,670	1,439,089,710	449,510,960	37,000,000
62	KELURAHAN LEMBO	699,230,770	364,008,665	335,222,105	27,000,000
63	KECAMATAN LANGGIKIMA	1,583,973,114	1,174,419,114	409,554,000	34,000,000
64	KELURAHAN LANGGIKIMA	725,502,016	241,226,016	484,276,000	40,000,000
65	KECAMATAN OHEO	1,634,528,935	1,149,541,221	484,987,714	40,000,000
66	KELURAHAN LINOMOIYO	700,864,304	322,724,680	378,139,624	31,500,000
67	KECAMATAN ANDOWIA	2,405,641,322	1,957,730,435	447,910,887	37,000,000
68	KELURAHAN ANDOWIA	700,000,000	259,070,333	440,929,667	36,000,000
69	KECAMATAN MOTUI	1,513,592,300	1,012,070,300	501,522,000	41,000,000
70	KELURAHAN BENDE	726,636,782	228,608,382	498,028,400	41,500,000
71	KECAMATAN WAWOLESEA	1,374,194,204	907,953,804	466,240,400	38,500,000
72	KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN	699,496,504	325,834,000	373,662,504	31,000,000
73	KECAMATAN LANDAWÉ	1,760,861,906	1,365,123,866	395,738,040	32,000,000
74	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	39,479,304,585	35,862,188,144	3,617,116,441	200,000,000
JUMLAH :		1,593,635,526,904	1,289,891,572,010	302,266,045,274	17,003,500,000

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 2 Januari 2023



BUPATI KONAWE UTARA



H. RUKSAMIN